

KONSEP KEWARGANEGARAAN DAN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KARAKTER BANGSA

Intan Septifania

Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Seri Wahyuni

Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Aldi Andiano Fachrezy

Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Nafela Febrita

Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Andi Muliadi Hasibuan

Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Surya Aina Yadaihi

Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Akdila Bulanov

Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jalan Gurun Aua, Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam.

Korespondensi penulis: intanseptifania59@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the historical development of citizenship and national insight and their relevance in building the character of the Indonesian nation from an Islamic perspective. Citizenship is a concept related to the status, rights, and obligations of individuals as citizens, while national insight refers to a perspective that prioritizes unity and national integrity in social, national, and state life. This research employs a library research method by analyzing various relevant literature sources. The findings indicate that citizenship values, such as responsibility, obedience to law, democracy, and active participation, play an important role in shaping national character. In addition, national insight through the values of unity, tolerance, nationalism, and patriotism contributes to strengthening national identity. From an Islamic perspective, the values of trustworthiness (amanah), justice, brotherhood (ukhuwah), and moderation are closely related to the formation of a noble, tolerant, and responsible national character. The integration of citizenship values, national insight, and Islamic teachings is increasingly relevant in the era of globalization as an effort to preserve national identity while fostering a religious, ethical, and competitive generation capable of contributing to national development. Therefore, these three concepts can serve as a foundation for building an advanced, harmonious, and competitive Indonesian nation.*

Keywords: *Citizenship; Globalization; Islamic Perspective; National Character; National Insight.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah lahirnya kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan serta relevansinya dalam membangun karakter bangsa Indonesia dari perspektif Islam. Kewarganegaraan merupakan konsep yang berkaitan dengan status, hak, dan kewajiban seseorang sebagai warga negara, sedangkan wawasan kebangsaan merupakan cara pandang yang menempatkan persatuan dan kesatuan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kewarganegaraan seperti tanggung jawab, kepatuhan terhadap hukum, demokrasi, dan partisipasi aktif memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa. Selain itu, wawasan kebangsaan melalui nilai persatuan, toleransi, nasionalisme, dan cinta tanah air juga berkontribusi

Naskah Masuk: 24 Juni 2026; Revisi: 24 Juni 2026; Diterima: 25 Juni 2026; Terbit: 25 Juni 2026

dalam memperkuat identitas nasional. Dalam perspektif Islam, nilai amanah, keadilan, ukhuwah, dan moderasi memiliki keterkaitan yang erat dengan pembentukan karakter bangsa yang berakhlak mulia, toleran, dan bertanggung jawab. Integrasi nilai-nilai kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan ajaran Islam menjadi semakin relevan di era globalisasi sebagai upaya menjaga identitas nasional sekaligus membentuk generasi yang religius, berintegritas, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, ketiga konsep tersebut dapat menjadi fondasi dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang maju, harmonis, dan berdaya saing.

Kata Kunci: *Globalisasi; Karakter Bangsa; Kewarganegaraan; Perspektif Islam; Wawasan Kebangsaan.*

PENDAHULUAN

Karakter bangsa adalah suatu jati diri atau identitas yang dimiliki oleh bangsa. Karakter bangsa Indonesia adalah karakter yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia yang didasarkan pada perilaku-perilaku yang dinilai sebagai suatu kebajikan yang berlandaskan pada suatu prinsip. Pembinaan jati diri akan mendorong seseorang memiliki karakter yang tangguh yang tercermin pada sikap dan perilakunya. Tanpa adanya jati diri, suatu bangsa akan mudah terombang-ambing dan kehilangan arah dari terpaan tantangan globalisasi yang bergerak cepat dewasa ini.

Berbagai tantangan globalisasi telah memengaruhi identitas kebangsaan masyarakat Indonesia, yang ditandai dengan menurunnya rasa nasionalisme, kepedulian sosial, dan kecintaan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Berbagai permasalahan sosial seperti korupsi, rendahnya kepedulian sosial, serta melemahnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara menunjukkan bahwa penguatan karakter bangsa masih menjadi tantangan dalam sistem pendidikan Indonesia. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, maka dapat berdampak pada melemahnya kualitas sumber daya manusia dan karakter bangsa yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi dewasa ini mendapat tantangan yang sangat kuat, terutama karena pengaruh kekuasaan internasional (Cahyani, 2022). Menurut Berger (1988), era globalisasi dewasa ini, ideologi kapitalislah yang akan menguasai dunia. Kapitalisme telah mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, dan secara tidak langsung juga nasib sosial, politik, dan kebudayaan. Perubahan global ini menurut Fukuyama (1989) membawa perubahan suatu ideologi, yaitu dari ideologi partikular ke arah ideologi universal dan dalam kondisi seperti ini kapitalisme yang akan menguasainya.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan berkarakter. Kewarganegaraan merupakan penyatuan dari berbagai jenis hak-hak warga negara yang meliputi hak sipil, politik, dan sosial. Konsep kewarganegaraan yang selalu dikaitkan dengan pembelaan kepentingan global (global society) terkait dengan global citizenship, yang muncul karena adanya keyakinan tentang ketidakcukupan konsepsi kewarganegaraan yang ada dalam menjelaskan fenomena globalisasi dan transnasionalisasi. Dengan demikian, konsep kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan status hukum seseorang dalam suatu negara, tetapi juga mencerminkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wawasan Kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek

ekonomi, politik, sosial budaya, dan hankam. Dengan demikian, wawasan kebangsaan tidak hanya berfungsi sebagai konsep politik, tetapi juga menjadi landasan dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman suku, agama, ras, dan budaya.

Islam memiliki dimensi normatif yang bersifat komprehensif. Nilai keadilan, musyawarah, toleransi, dan tanggung jawab sosial menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga pada pembentukan civic morality yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat dengan pembentukan karakter bangsa. Penelitian oleh Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk. (2025) membahas pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif Islam dengan fokus pada integrasi nilai-nilai syariah dalam kurikulum pendidikan. Penelitian oleh Iza Rohma Nst dan Syamzaimar (2024) mengkaji konsep kewarganegaraan dalam perspektif Islam melalui pendekatan normatif dan kontekstual. Penelitian oleh M. Khamim (2024) membahas wawasan kebangsaan dalam perspektif Islam dengan fokus pada konsep nasionalisme dalam Al-Qur'an. Sementara itu, penelitian oleh Hendrikus Otniel Nasozaro (2019) mengenai pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, dan kesadaran berbangsa.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai kewarganegaraan dalam perspektif Islam maupun wawasan kebangsaan telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian masih membahas kedua konsep tersebut secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kajian yang mengintegrasikan konsep kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan dalam perspektif Islam serta menganalisis relevansinya terhadap pembentukan karakter bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kewarganegaraan dalam perspektif Islam, menganalisis konsep wawasan kebangsaan dalam perspektif Islam, serta menganalisis relevansi kedua konsep tersebut terhadap pembentukan karakter bangsa Indonesia.

KAJIAN TEORI

Kewarganegaraan merupakan status hukum yang menunjukkan hubungan antara seseorang dengan suatu negara. Status tersebut memberikan identitas, hak, dan kewajiban yang melekat pada individu sebagai warga negara. Secara umum, kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencerminkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negara yang meliputi hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wawasan kebangsaan adalah cara seseorang atau sekelompok orang melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan spirit kebangsaan dalam suatu negara. Semakin mereka mengerti dan mendalami nilai-nilai dan spirit yang telah disepakati bersama dalam suatu negara serta menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka semakin kokoh pula keberadaan bangsa dan negaranya.

Dalam perspektif Islam, kewarganegaraan dibangun di atas kerangka normatif yang menempatkan keadilan ('adl) sebagai prinsip fundamental dalam tata sosial. Selain itu, prinsip musyawarah (shura) menunjukkan bahwa partisipasi publik merupakan elemen inheren dalam

sistem sosial Islam. Hal ini mengindikasikan adanya kesesuaian antara nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi deliberatif modern (Muchtarom dan Selamat, 2023).

Karakter bangsa merupakan identitas yang mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Karakter bangsa Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut meliputi religiusitas, kejujuran, kemandirian, toleransi, tanggung jawab, gotong royong, dan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena kajian ini berfokus pada analisis konsep kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan dalam perspektif Islam serta relevansinya terhadap pembentukan karakter bangsa Indonesia melalui berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber data penelitian diperoleh dari jurnal ilmiah, buku elektronik (e-book), dan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, membaca, mengkaji, dan mencatat informasi yang berkaitan dengan konsep kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, perspektif Islam, dan karakter bangsa. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kewarganegaraan dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan status hukum yang menunjukkan hubungan antara seseorang dengan suatu negara. Status tersebut memberikan identitas, hak, dan kewajiban yang melekat pada individu sebagai warga negara. Secara umum, kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencerminkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negara yang meliputi hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota suatu negara. Status tersebut memberikan identitas hukum sekaligus hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, status warga negara juga memberikan akses terhadap perlindungan hukum dan pelayanan publik yang disediakan oleh negara.

Hubungan antara negara dan warga negara merupakan bagian penting dalam konsep kewarganegaraan. Hubungan tersebut mencakup hubungan antarwarga negara, hubungan warga negara dengan otoritas politik, serta hubungan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Pengaturan hubungan yang seimbang akan menentukan corak suatu negara, baik yang demokratis maupun yang cenderung otoriter.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak warga negara adalah kewenangan yang dimiliki warga negara dalam melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UUD 1945, hak warga negara meliputi hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, serta hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial. Sedangkan kewajiban

warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara meliputi menaati hukum, membayar pajak, menghormati hak asasi manusia, ikut serta dalam pertahanan negara, serta menjaga ketertiban dan persatuan bangsa.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dalam konteks kewarganegaraan, penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi bagian penting dari hubungan antara negara dan warga negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara tanpa diskriminasi. Berdasarkan uraian tersebut, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pemenuhan hak oleh negara harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban oleh warga negara demi mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, dan demokratis.

3. Konsep Kewarganegaraan dalam Islam

Dalam sejarah politik Islam, Piagam Madinah sering dipandang sebagai bentuk awal kontrak sosial yang mengatur hubungan antara kelompok masyarakat yang plural. Dokumen tersebut tidak hanya mengatur relasi antar umat Islam, tetapi juga memberikan pengakuan terhadap komunitas non-Muslim sebagai bagian dari masyarakat politik yang memiliki hak dan kewajiban bersama (Hefner, 2020). Piagam Madinah memperlihatkan bahwa Islam sejak awal telah mengembangkan prinsip kewarganegaraan berbasis koeksistensi sosial dan penghormatan terhadap keberagaman.

Al-Qur'an memberikan pedoman mengenai pentingnya menjaga dan melindungi hak setiap manusia, baik hak individu maupun hak publik. Dalam perspektif Islam, pemerintah sebagai pemegang otoritas negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. Konsep tersebut sejalan dengan maqashid al-syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Oleh karena itu, konsep kewarganegaraan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia dan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

Kewarganegaraan dalam Islam dibangun di atas kerangka normatif yang menempatkan keadilan ('adl) sebagai prinsip fundamental dalam tata sosial. Keadilan tidak hanya dipahami dalam dimensi distributif, tetapi juga sebagai prinsip etis yang mengatur relasi kekuasaan dan interaksi sosial (Kamali, 2021). Dalam konteks kewarganegaraan, perlindungan hak warga negara menjadi bagian penting dari tanggung jawab negara. Islam menempatkan pemimpin sebagai amanah yang wajib menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat tanpa diskriminasi.

4. Nilai-nilai Islam dalam Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dalam Islam tidak berdiri sebagai konsep legalistik semata, melainkan berakar pada struktur normatif yang bersumber dari wahyu. Nilai pertama yang menjadi dasar kewarganegaraan dalam Islam adalah keadilan ('adl). Prinsip keadilan ('adl) menempati posisi sentral sebagai fondasi etika publik yang mengatur distribusi hak dan kewajiban secara proporsional (Kamali, 2021).

Nilai kedua adalah kesetaraan (musawah) yang memperkuat dimensi inklusivitas dengan menolak hierarki sosial berbasis identitas primordial. Dalam konteks ini, Islam secara konseptual

telah mengantisipasi prinsip non-diskriminasi yang menjadi pilar dalam diskursus hak asasi manusia modern (Saeed, 2020).

Nilai ketiga adalah musyawarah (shura). Prinsip musyawarah (shura) menunjukkan adanya mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan, yang secara substantif memiliki kesesuaian dengan model demokrasi deliberatif (Muchtarom dan Selamat, 2023).

Nilai keempat adalah tanggung jawab sosial. Konsep tanggung jawab sosial yang berakar pada konsep khalifah menegaskan bahwa kewarganegaraan dalam Islam bersifat etis dan kolektif, bukan individualistik. Berdasarkan uraian tersebut, nilai keadilan, kesetaraan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial menunjukkan bahwa kewarganegaraan dalam Islam tidak hanya menekankan aspek hak dan kewajiban, tetapi juga pembentukan etika sosial yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, harmonis, dan bertanggung jawab.

B. Konsep Wawasan Kebangsaan dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan adalah cara seseorang atau sekelompok orang melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan spirit kebangsaan dalam suatu negara. Cara melihat dirinya ini terkandung makna sebagai kemampuan diri untuk merasa bahwa dirinya adalah bagian integral dari bangsa dan negara di mana dirinya berada. Semakin mereka mengerti dan mendalami nilai-nilai dan spirit yang telah disepakati bersama dalam suatu negara serta menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka semakin kokoh pula keberadaan bangsa dan negaranya.

Dalam konteks Indonesia, wawasan kebangsaan menjadi cara pandang bangsa dalam memahami diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan kebangsaan berfungsi sebagai pedoman dalam mewujudkan persatuan nasional serta mencapai tujuan bangsa di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

2. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu: penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu; cinta akan tanah air dan bangsa; demokrasi atau kedaulatan rakyat; kesetiakawanan sosial; dan masyarakat adil-makmur. Berdasarkan nilai-nilai dasar itu, wawasan kebangsaan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai objek dan subjek usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan falsafah hidup Pancasila.

3. Nasionalisme dalam Perspektif Islam

Kenyataan bahwa hakikat dan makna nasionalisme di dalam Al-Qur'an adalah nasionalisme yang bermakna luas (semangat kebangsaan) juga didukung oleh ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah Swt menciptakan manusia berbangsa-bangsa bukan untuk saling bermusuhan, membenci, dan merendahkan satu sama lain, akan tetapi guna saling mengenal sehingga dapat meningkatkan ketakwaan, sebagaimana pada QS. Al-Hujurat [49]: 13. Selain itu, di dalam nasionalisme umat juga dituntut untuk bersikap moderat, sebagaimana pada penjelasan QS. Al-Baqarah [2]: 143.

Secara umum, para ulama berpendapat bahwa nasionalisme dalam Islam dapat dikaitkan dengan Piagam Madinah sebagai bentuk kesepakatan bersama dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Piagam Madinah yang lahir di Semenanjung Arab merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia yang berisi aturan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh umat di Yatsrib, yang dibidani langsung oleh Nabi Muhammad Saw. (Ahmad, 2014). Hal ini secara eksplisit menunjukkan bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok nabi yang nasionalis, yang tidak hanya mengajarkan hukum-hukum peribadatan dalam beragama tetapi juga memberikan praktik dalam penerapan sistem keamanan dalam tatanan masyarakat sebagai bentuk cinta tanah air.

4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Faktor-faktor yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dapat kita sebut sebagai peluang-peluang yang harus dipelihara dan dikembangkan, sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat bahkan memecah belah persatuan dan kesatuan dapat kita sebut sebagai hambatan-hambatan yang harus dicegah. Hal-hal yang harus dipelihara untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa antara lain keutuhan dan kedaulatan wilayah negara dari Sabang sampai Merauke, Pancasila dan UUD tahun 1945 sebagai acuan dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta konsep wawasan nusantara dan ketahanan nasional sebagai acuan operasional.

Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu tujuan utama wawasan kebangsaan. Persatuan dapat diperkuat melalui penghormatan terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, serta komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945. Sebaliknya, sikap diskriminatif, kesenjangan sosial, dan konflik identitas dapat menjadi hambatan bagi persatuan bangsa.

5. Relevansi bagi Indonesia

Wawasan Kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan hankam. Integrasi nasional diartikan sebagai suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa.

Dalam perspektif Islam, nilai persaudaraan, toleransi, dan keadilan memiliki kesesuaian dengan tujuan wawasan kebangsaan Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Dengan demikian, wawasan kebangsaan dalam perspektif Islam memiliki relevansi yang kuat bagi Indonesia karena sama-sama menekankan persatuan, toleransi, keadilan, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman.

C. Relevansi Konsep Kewarganegaraan dan Wawasan Kebangsaan dalam Perspektif Islam terhadap Karakter Bangsa Indonesia

1. Karakter Bangsa Indonesia

Karakter bangsa merupakan identitas yang mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Karakter bangsa Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut meliputi religiusitas, kejujuran, kemandirian, toleransi, tanggung jawab, gotong royong, dan keadilan sosial.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang menjadi fondasi pembentukan karakter bangsa. Penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk masyarakat yang berakhlak, menghargai keberagaman, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dengan karakter yang kuat, bangsa Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global tanpa kehilangan identitas nasionalnya.

2. Nilai Kewarganegaraan yang Membentuk Karakter Bangsa

Nilai-nilai kewarganegaraan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan status hukum seseorang sebagai warga negara, tetapi juga mencakup kesadaran akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pemahaman kewarganegaraan, warga negara didorong untuk memiliki sikap tanggung jawab, disiplin, kepatuhan terhadap hukum, serta kepedulian terhadap kepentingan umum. Selain itu, nilai-nilai demokrasi, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia membentuk karakter warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjaga kehidupan demokratis.

3. Nilai Wawasan Kebangsaan yang Membentuk Karakter Bangsa

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam wawasan kebangsaan seperti persatuan, toleransi, nasionalisme, dan cinta tanah air memiliki peran penting dalam membangun karakter warga negara yang bertanggung jawab dan berintegritas.

Nilai pertama adalah persatuan. Persatuan merupakan faktor utama yang menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Melalui nilai persatuan, terbentuk karakter gotong royong, solidaritas, dan rasa kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa.

Nilai kedua adalah toleransi. Toleransi merupakan sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang ada dalam masyarakat. Dalam kehidupan bangsa yang multikultural, toleransi menjadi kunci terciptanya kerukunan dan perdamaian. Sikap toleransi akan membentuk karakter yang terbuka, menghargai hak orang lain, serta mampu hidup berdampingan secara harmonis.

Nilai ketiga adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan rasa cinta, bangga, dan setia terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme tidak hanya diwujudkan melalui simbol-simbol kenegaraan, tetapi juga melalui partisipasi aktif dalam pembangunan, kepatuhan terhadap hukum, dan kepedulian terhadap kepentingan nasional. Dalam perspektif Islam, nasionalisme sejalan dengan semangat menjaga kemaslahatan umat dan negara selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Nilai keempat adalah cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan sikap yang menunjukkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Nilai cinta tanah air membentuk karakter bangsa yang peduli, rela berkorban, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Di era globalisasi, penguatan nilai persatuan, toleransi, nasionalisme, dan cinta tanah air menjadi semakin penting. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa nilai-nilai wawasan kebangsaan memiliki kontribusi yang besar dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Persatuan melahirkan solidaritas, toleransi menumbuhkan sikap saling menghargai, nasionalisme

memperkuat loyalitas terhadap bangsa, dan cinta tanah air menumbuhkan kepedulian serta tanggung jawab terhadap negara.

4. Kontribusi Nilai Islam terhadap Karakter Bangsa

Nilai-nilai Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Dalam perspektif Islam, pembentukan karakter tidak hanya berorientasi pada hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai seperti amanah, keadilan, ukhuwah, dan moderasi memiliki relevansi yang kuat dalam membangun karakter bangsa yang berintegritas, toleran, serta mampu menjaga persatuan dalam keberagaman.

Pertama, amanah. Amanah merupakan nilai yang berkaitan dengan tanggung jawab, kejujuran, dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas maupun kewajiban. Sikap amanah mendorong individu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang serta menghindari berbagai tindakan yang merugikan kepentingan umum.

Kedua, keadilan. Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang menekankan perlakuan yang setara terhadap seluruh manusia tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun golongan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, nilai keadilan berperan dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan memperkuat persatuan nasional.

Ketiga, ukhuwah. Ukhuwah atau persaudaraan merupakan nilai Islam yang mengajarkan pentingnya solidaritas, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Dalam sejarah Islam, nilai ukhuwah tercermin dalam Piagam Madinah yang menekankan pentingnya kerja sama, saling membantu, serta penghormatan terhadap kebebasan beragama demi menjaga keamanan dan persatuan bersama. Nilai ukhuwah sangat relevan dengan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman.

Keempat, moderasi. Moderasi atau wasathiyah merupakan sikap tengah yang menghindari perilaku ekstrem dan mengedepankan keseimbangan dalam kehidupan. Dalam perspektif Islam, moderasi diwujudkan melalui sikap toleran, menghargai perbedaan, dan mengutamakan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Oleh karena itu, moderasi menjadi nilai yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa yang inklusif, toleran, dan mampu hidup berdampingan secara damai.

Berdasarkan uraian tersebut, nilai amanah, keadilan, ukhuwah, dan moderasi memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan karakter bangsa Indonesia. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dengan konsep kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan dapat menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia yang berakhlak mulia, demokratis, serta memiliki semangat persatuan dan cinta tanah air.

5. Relevansi di Era Globalisasi

Era globalisasi membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui perkembangan teknologi informasi, budaya, dan ekonomi yang semakin terbuka. Kondisi ini menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan identitas nasional dan nilai-nilai karakter bangsa.

Dalam kondisi tersebut, integrasi nilai-nilai Islam, kewarganegaraan, dan wawasan kebangsaan menjadi sangat penting. Nilai Islam seperti amanah, keadilan, ukhuwah, dan moderasi dapat memperkuat moral dan spiritual masyarakat. Sementara itu, nilai kewarganegaraan menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara,

sedangkan wawasan kebangsaan memperkuat persatuan, nasionalisme, dan cinta tanah air. Melalui integrasi ketiga nilai tersebut, generasi muda diharapkan mampu menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitas nasional.

KESIMPULAN

Kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan merupakan dua konsep penting yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kewarganegaraan menekankan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sedangkan wawasan kebangsaan berfungsi sebagai cara pandang yang mengutamakan persatuan, kesatuan, dan kepentingan nasional di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kedua konsep tersebut memiliki peran yang besar dalam membentuk karakter bangsa yang bertanggung jawab, demokratis, toleran, serta memiliki rasa cinta tanah air.

Dalam perspektif Islam, nilai-nilai seperti amanah, keadilan, ukhuwah, dan moderasi memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan. Nilai amanah mendorong terbentuknya sikap tanggung jawab dan integritas, keadilan menumbuhkan penghormatan terhadap hak dan kewajiban, ukhuwah memperkuat persatuan dan solidaritas sosial, sedangkan moderasi mendorong sikap toleran dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, ajaran Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk karakter bangsa yang berakhlak mulia dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Di era globalisasi, integrasi antara nilai-nilai kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan ajaran Islam menjadi semakin relevan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi identitas nasional. Melalui penguatan ketiga aspek tersebut, diharapkan terbentuk generasi yang religius, berintegritas, cinta tanah air, menghargai keberagaman, serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai Islam perlu terus ditanamkan melalui pendidikan dan kehidupan sosial sebagai fondasi dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang maju, harmonis, dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, O. (Ed.). (2023). *Kewarganegaraan: Teoretis dan Praksis*. Malang: Future Science Publisher.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. *Hukum Inovatif*, 2(1), 28-49. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.943>
- Febriyanti, F. N. R., Widuatie, M. R. E., Situmorang, R. R. B., Julieta, L. C. V., Rianto, H. F. S., & Ali, B. A. (2025). Implementasi Nilai Toleransi Antarumat Beragama sebagai Upaya Penguatan Integrasi Nasional di Kalangan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Jember Angkatan 2023. *Jurnal PEKAN*, 10(2), 158-162.
- Irfan, T. W. (2018). Classical and Modern Citizenship Concept in Islamic Perspective. *Journal of Moral and Civic Education*, 2(1), 38-43. <https://doi.org/10.24036/885141221201889>

- Khamim, M. (2024). Wawasan Kebangsaan Perspektif Islam: Konsepsi Nasionalisme dalam Al-Qur'an [Manuskrip tidak diterbitkan].
- Maimun, Sholeh, B., & Tantri, M. K. (2025). Urgensi wawasan kebangsaan dalam penguatan persatuan dan kesatuan di era digital: Wawasan kebangsaan dalam perspektif keberagaman. *Journal of Communication in Tourism, Culture and Education*, 1(1), 13-22.
- Mubarok, N., Hakim, M. F., Holilah, Hajar, I. I., & Wigati, S. (2020). *Kewarganegaraan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Jannah, H. M., Fatimah, V., & Fadilah, N. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Islam: Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Kurikulum Pendidikan. *Aktivisme*, 2(2), 40-59. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i2.889>
- Nst, I. R., & Syamzaimar. (2024). Konsep Kewarganegaraan dalam Perspektif Islam: Analisis Normatif dan Kontekstual. *AL MIDAD: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Studi Keislaman*, 2(2), 22-33.
- Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan. (2022). *Wawasan Kebangsaan*. Singaraja: Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- Siregar, N. (tanpa tahun). Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Era Globalisasi. *Educate: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 1(2).
- Utomo, B., & Salhefni. (2007). *Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Depok: Pusdiklat Pegawai Departemen Pendidikan Nasional.
- Yuniar, A. E., & Putri, N. K. (2022). Membentuk Karakter Bangsa yang Kuat dengan Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 1(2).